

**RENCANA KERJA**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KOTA MAGELANG TAHUN 2018**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan mempunyai Rencana Pembangunan Tahunan (Renja OPD) yang merupakan penjabaran Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang selanjutnya digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan APBD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2018.

Oleh karena itu berdasarkan amanat Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 bahwa perlu disusun RKPD Tahun 2018 sebagai dasar penyusunan KUA-PPA yang nantinya ditetapkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2018.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berdasar pada Perda Nomor 3 Tahun 2016 tersebut, ditetapkan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, sehingga Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Magelang pada dasarnya memiliki ulasan sebagaimana Renja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang dengan penambahan program dan kegiatan di bidang pengelolaan barang milik daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dimulai dengan usulan kegiatan yang diajukan oleh masing-masing Kasubag/Kasubid pada Sekretariat, Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran, Bidang Pembelanjaan, Bidang Akuntansi, dan Bidang Aset disesuaikan dengan kebutuhan riil yang ada agar kemudian usulan kegiatan tersebut dibawa/dibahas dalam rapat struktural Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dirangkum menjadi Rancangan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dan disepakati dan diolah serta diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang untuk dibahas dan ditetapkan.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2018 merupakan penjabaran awalpelaksanaan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021. Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang juga sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2018.

Sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2018, disebutkan pada Bab. I Pendahuluan bahwa RKPD Kota Magelang tahun 2017 ini merupakan tahun kedua perencanaan tahap III pelaksanaan RPJMD 2016-2021.

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Magelang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah disampaikan pada Bab III RPJMD, BPKAD mendukung untuk mewujudkan visi **“MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS”**, Adapun telaah dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kota Jasa

Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan.

2. Kota Modern

Modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada. Kota modern adalah kota yang mampu menyelaraskan sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota tersebut, dengan karakteristik: (a) Masyarakat sejahtera dalam financial; (b) Kota terdepan dalam pelayanan (kota modern menyediakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan para pengguna kota atau masyarakat umum); (c) Visual kota mengundang pesona (kota modern dapat dilihat dari fisiknya, secara visual kota terlihat tertata, menarik, mengundang kenyamanan untuk tinggal dan berkarya).

3. Kota Cerdas

Kota cerdas adalah kota yang dikelola secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah. Unsur-unsur Kota Cerdas: (1) *Smart Governance* yaitu: pengembangan *e-governance*, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; (2) *Smart infrastructure* yaitu: pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT; (3) *Smart Economy*, yaitu: pengembangan *city branding*, pengembangan kewirausahaan, pengembangan *e-commerce*, dan ekonomi kreatif; (4) *Smart environment* yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis

IT, pemanfaatan sumber energi terbarukan; (5) *Smart people* yaitu: pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dan dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat; serta (6) *Smart Living* yaitu: kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media, dan kemudahan akses terhadap jaminan keamanan.

#### 4. Masyarakat Sejahtera

Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan dan pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata tanpa diskriminasi melalui: (1) Optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (2) Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (3) Tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.

#### 5. Masyarakat Religius

Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan kecukupan ketersediaan tempat ibadah.

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.
5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Berdasarkan penjabaran atas Visi-Misi Kota Magelang Tahun 2016-2021, BPKAD bertanggungjawab untuk mewujudkan unsur visi kota jasa yang modern dan cerdas, dengan mendukung Misi 1 ***"Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat "***

Selanjutnya BPKAD, dalam mewujudkan pencapaian Misi 1 tersebut berfokus pada tujuan dan sasaran pada RPJMD sebagai berikut :

**Tujuan 1** : Mewujudkan reformasi birokrasi (tata kelola pemerintahan) dengan aparatur profesional dan berintegritas.

- Sasaran 2** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif, dengan indikator :
- Nilai Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP
- Tujuan 3** : Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara partisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan.
- Sasaran 5** : Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah, dengan indikator :
- Derajat Otonomi Fiskal
  - Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah

Dengan sasaran dan indikator sasaran tersebut, maka BPKAD sebagai penyelenggara pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah menitikberatkan seluruh program dan kegiatannya pada bidang-bidang guna mencapai indikator sasaran tersebut.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2018 diantaranya adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2010 – 2015;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukann dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Nomor 050.23/151/112 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2018 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2018 bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Adapun tujuan dibuatnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini adalah :

1. Sebagai pengendali kegiatan di BPKAD agar terarah;
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan di BPKAD
4. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan di BPKAD Kota Magelang.

Dengan demikian dokumen Renja BPKAD sebagai pedoman dan arah di dalam menyusun anggaran BPKAD dan sebagai dasar penentuan KUA

dan PPAS, serta RKA APBD Tahun Anggaran 2018 oleh Kepala BPKAD Kota Magelang.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2018 adalah:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD DAN CAPAIAN RENSTRA**

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD BPKAD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan kegiatan

##### **BAB IV PENUTUP**



**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD**  
**DAN CAPAIAN RENSTRA**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD**

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2017, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program/kegiatan Renstra Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. Adapun tabel evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra OPD dapat dilihat pada tabel dibawah.

**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD sampai dengan Triwulan II Tahun 2017**

Pelaksanaan Renja DPPKD Tahun 2016 sebagian besar terlaksana sesuai output yang diharapkan. Jika dilihat dari serapan anggaran, ada beberapa kegiatan yang perlu diefektifkan.

Selain itu, dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pengelolaan Keuangan dalam hal Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan tambahan pengetahuan terkait Pengelolaan Keuangan

Daerah mengingat tidak semua aparatur di Pemerintah Kota Magelang memiliki latar belakang Pengelolaan Keuangan.

## 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Pelaksanaan program kegiatan pada DPPKD Kota Magelang pada Tahun 2016 sebagian besar dapat memenuhi target output pada tahun berkenaan. Jika dikaitkan dengan pencapaian indikator pencapaian renstra, kinerja DPPKD secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Awal Periode RPJMD dan Target Capaian Tahun 2016**

<b>NO</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Derajat Otonomi Fiskal	23,89%	21,40%	26,22%
2	Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap Dana Pusat dan Dana Provinsi	45,41%	80,27%	65,60%
3	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	WTP	WTP

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan, jika dilihat dari pencapaian indikator kinerja SPM sudah mampu dipenuhi dan dilaksanakan. Pencapaian dari segi kuantitas sudah dapat dicapai tetapi masih perlu dikaji lagi tingkat pencapaian dari segi kualitas dokumen yang dihasilkan.

Gambaran isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diantaranya adalah :

- Masih dijumpainya penentuan target Pendapatan Asli Daerah khususnya retribusi oleh unit penghasil masih menggunakan pendekatan *incremental based budgeting*, yang mestinya target berdasarkan potensi riil. Untuk itu study potensi retribusi menjadi kebutuhan dan dapat dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan.
- Untuk mempercepat proses pengelolaan keuangan serta dalam rangka meningkatkan tertib administrasi keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel khususnya Bendahara Umum Daerah (BUD) dan pengguna Kas (Bank) masih menggunakan system konvensional, sehingga diperlukan pengembangan system layanan secara online.
- Dalam rangka meningkatkan PAD dari Pajak Bumi dan Bangunan, diperlukan upaya penilaian kembali/penilaian secara rutin terhadap obyek PBB. Selain itu dalam rangka menghindari terjadinya *potensial lost* terhadap pendapatan.
- Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan atas terbitnya Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah belum terbit, sehingga sampai dengan saat ini masih berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang lama dimana sudah banyak yang tidak sesuai dengan UU. Salah satu yang urgent untuk dilaksanakan penyesuaian adalah Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Belum sinkronnya antara peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya yang menyangkut dana transfer daerah dengan penyusunan APBD sehingga terjadi ketidakselarasan dalam proses penganggaran.
- Belum sepenuhnya Law Enforcement dijalankan, yaitu berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
- Belum adanya peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan nilai pasar.
- Belum optimalnya penggunaan instrument Analisa Standar Biaya Perencanaan penganggaran dalam penyusunan penganggaran.
- Tingkat pemahaman penatausahaan keuangan terhadap regulasi pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD belum sama dan belum memadai.
- Pencairan anggaran belum sesuai dengan aliran kas sehingga terjadi penumpukan pencairan anggaran di Triwulan IV.
- Belum optimalnya pemahaman pengelola keuangan SKPD atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis accrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- Aset tetap belum tersaji secara lengkap.
- Masih terdapat kepemilikan tanah yang belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Magelang.
- Tindak lanjut hasil sensus barang belum optimal.
- Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (Pengurus Barang) untuk mengelola barang milik daerah masih perlu ditingkatkan.
- Belum adanya sistem yang terintegrasi antara pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan keuangan daerah sehingga data yang tersajikan dapat menjadi informasi yang sama dan bisa diyakini kebenarannya.
- Rekonsiliasi antara pengelola barang dan pengelola keuangan harus dilakukan secara rutin atau berkala untuk memperoleh keakuratan data sehingga dapat tersaji dalam laporan keuangan;

- Masih terbatasnya sumber daya manusia pengurus barang baik kuantitas maupun kualitasnya di Perangkat Daerah yang memiliki aset besar yang berakibat dalam penyajian Laporan Pengelolaan Aset dan Barang menjadi tidak bisa diyakini.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Bahwa penyusunan Renja OPD BPKAD telah mendasar pada rancangan awal RKPD Tahun 2018 dan secara fokus mengakomodir hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab BPKAD.

Proses penyusunan RKPD diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD untuk menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif maupun politis.

Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja OPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Pada prinsipnya sebuah kebijakan menjadi relevan dan dapat dipedomani bagi suatu daerah karena beberapa karakteristik :

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

BPKAD merupakan OPD teknis yang menangani pengelolaan keuangan daerah dan secara kewenangan tidak terkait secara langsung dengan usulan kegiatan dari masyarakat.

Namun demikian terkait dengan usulan aloksi untuik hibah dan bansos yang berupa uang, BPKAD mengalokasikan anggaran dalam belanja tidak langsung berdasar rekomendasi di OPD sesuai kewenangannya.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi.

Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementrian Keuangan adalah *"Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif"*

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif.  
Partisipatif merupakan perwujudan penyusunan penganggaran daerah yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan.  
Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien  
Efektif merupakan pencapaian keluaran dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.  
Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertinggi.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel.  
Akuntabel merupakan perwujudan pelaporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.



5. Pengelolaan Keuangan Daerah yang kompetitif.  
Kompetitif merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan dapat diperbandingkan dengan yang lain.

Untuk mewujudkan visi tersebut misi yang diemban adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah.
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan.
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Daerah.

Mengkaji visi dan misi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah memberikan tantangan bagi BPKAD Kota Magelang untuk:

1. Mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah.
3. Mendorong peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah.

Selanjutnya Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah "***Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari Mboten Korupsi lan Mboten Ngapusi***", yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi untuk mewujudkannya. Adapun Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi pengelolaan keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah menjabarkannya dengan menetapkan visi SKPD, yaitu "*Menjadi badan yang transparan dan akuntabel didukung oleh pelayanan prima dalam mewujudkan optimalisasi pendapatan dan pengelolaan aset daerah yang berdaya guna*". Misi yang disusun untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM.
2. Mengembangkan implementasi teknologi informasi.
3. Meningkatkan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur.
4. Meningkatkan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
6. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah.
7. Mengintensifkan dan mengekstensifkan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
8. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah.
9. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.

Analisis terhadap visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah memberikan tantangan bagi BPKAD Kota Magelang untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan asset yang berkualitas.

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menjabarkan visi Provinsi Jawa Tengah dengan *menetapkan* visi SKPD, yaitu " *Menjadi Institusi Terdepan dalam Mewujudkan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat secara Profesional dan Akuntabel Guna Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari*". Dengan Misi :

1. Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, konitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang tata pemerintahan, hokum, otonomi daerah dan kerjasama secara transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar *stakeholder*.
2. Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi pembangunan daerah, perekonomian dan produksi daerah yang semakin tertib, stabil dan mantap.
3. Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan tepat sasaran.

4. Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang organisasi, kehumasan, keuangan dan umum secara transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar *stakeholder*.

Berdasarkan *Renstra* Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, *Renstra* Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah serta *Renstra* Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut maka benang merah yang dapat ditarik adalah upaya untuk mewujudkan optimalisasi pendapatan daerah dan efektifitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja mengacu pada *renstra* OPD, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja BPKAD**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mewujudkan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	1. Tercapainya peningkatan pendapatan daerah	1. Derajat ekonomi fiskal	23,89%	21,40%	25,86%	31,96%	33,88%	35,62%
			2. Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	80,27%	73,66%	69,67%	67,45%	65,79%	63,65%
			3. Rasio pajak daerah terhadap PAD	13,24%	13,48%	12,56%	12,33%	12,15%	12%
			4. Rasio retribusi daerah terhadap PAD	3,12%	4,20%	6,36%	3,33%	3,1%	2,91%
			5. Prosentase pertumbuhan PAD	16,57%	18,44%	19,18%	12,83%	11,37%	10,21%
2.	Mewujudkan sistem penganggaran yang efektif dan efisien	1. Terwujudnya anggaran belanja pemerintah daerah yang berbasis kinerja	1. Penerapan SAB dalam proses penganggaran	100%	100%	100%	Ya	Ya	Ya
		2. Terwujudnya efektifitas proses penganggaran daerah	1. Persetujuan Raperda tentang APBD	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November
			2. Persetujuan Raperda tentang Perubahan APBD	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September
3.	Mewujudkan penatausahaan keuangasn yang efektif dan transparan	1. Terciptanya tertib administrasi pencairan dana	1. Prosentase pencairan dana belanja langsung dan tidak langsung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Terwujudnya penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Jumlah sisdur pengelolaan keuangan yang sesuai dengan perkembangan ketentuan	1	1	5	5	5	5

4.	Mewujudkan akuntabilitas kinerja keuangan daerah	1. Terciptanya laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	2. Prosentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	78%	81%	84%	87%	90%	90%
			3. Persetujuan Perda Pertanggungjawaban APBD	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli
5.	Mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang optimal	1. Terciptanya tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang	55%	60%	70%	100%	100%	100%
			2. Barang Milik yang didayagunakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Pelaporan semesteran Barang Milik Daerah yang tepat waktu	50%	50%	70%	100%	100%	100%
			4. Pelaporan tahunan Barang Milik Daerah yang tepat waktu	50%	100%	100%	100%	100%	100%

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program, kegiatan dan pendanaan, disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah, sebagaimana matriks sebagai berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Matrik Rencana Kerja BPKAD Kota Magelang Tahun 2018**

Ambil file : Renja BPKAD after desk rasional\_OK

**MATRIKS  
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2018**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan penunjang keuangan

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TOLOK UKUR	SATUAN	RAJU	Tahun2017	TAR42	Tahun2018	TAR3	Tahun2019	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORIT AS	STATUS
				INDIKA TIF TAR1									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Urusan Pilihan Pertanahan												
1	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				591.140.000			0	676.801.000				
		Tersedianya informasi pertanahan yang akurat	0	0,3		0,45		0,6					
	1. Peningkatan status tanah yang dimohon warga	jumlah barang yang terkuasai per total jumlah BMD	bidang		40.579.000	100		0	46.460.000	BPKAD Kota M; DAU			1 rencana
	2. Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	pelaksanaan proses persertifikatan aset tanah pemerintah kota Magelang	bidang	12	360.298.000	12		0	412.506.000	BPKAD Kota M; DAU			2 rencana
	3. Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan dalam rangka memfasilitasi inventarisasi tanah milik pemerintah kota	Kegiatan	1	94.334.000	1		0	108.004.000	BPKAD Kota M; DAU			3 rencana
	4. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah barang yang digunakan dan dimanfaatkan per total jumlah barang	Laporan	3	82.821.000	3		0	94.823.000	BPKAD Kota M; DAU			4 rencana
	5. Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Milik Pemda	jumlah bidang tanah milik pemkot yang diukur kembali untuk menegaskan batas-batasnya	bidang	2	13.108.000	2		0	15.008.000	BPKAD Kota M; DAU			5 rencana
	Urusan Pilihan Kearsipan												
2	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				136.130.000		139.610.000		157.600.000				
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	0	0,34		0,52		0,69					
		Persentase arsip dan risalah	0	0,82		0,82		0,82					
		Persentase Penyelamatan Arsip	0	0,47		0,53		0,6					
	1. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah arsip yang tertata	bidang	6	136.130.000	6	139.610.000	6	157.600.000	BPKAD Kota M; DAU			1 ExBAU
	Urusan Pilihan Perencanaan												
3	Program perencanaan pembangunan daerah				21.401.000		21.101.000		25.895.210				

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	SATUAN	LAGU	Tahun2017	TAR42	Tahun2018	TAR3	Tahun2019	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORIT AS	STATUS
				INDIKA TIF									
1	2	TOLOK UKUR	4	TAR1	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	0	100		100		100					
		Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	0	70		75		80					
		Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	0	72		75		80					
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	0	35		40		45					
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	0	0,76		0,78		0,8					
		Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	0	1		1		1					
	1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya rencana kerja perangkat daerah	Dokumen	2	21.401.000	2	21.101.000	2	25.895.210	BPKAD Kota M: DAU			1 ExBAU
	Urusan Pilihan Keuangan												
	4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.966.574.700		2.106.120.200		2.292.048.047				
	1. Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	Jumlah pembayaran PBB Gedung Kantor	%	100	31.100.000	100	0	100	33.100.000	b	DAU		1 ExBAU
	2. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya personil pengelola keuangan dan laporan pertanggungjawaban	Bulan	12	775.082.700	12	736.986.000	12	854.528.000	BPKAD Kota M: DAU			2 ExBAU
	3. Penyediaan jasa surat menyurat	surat masuk dan keluar	Bulan	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.157.625	BPKAD Kota M: DAU			3 ExBAU
	4. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	rekening telepon, faximili, dan internet	Bulan	12	97.800.000	12	247.800.000	12	113.215.725	BPKAD Kota M: DAU			4 ExBAU
	5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas dengan kelengkapan surat kendaraan	Unit	64	18.720.000	64	18.900.000	64	21.670.740	BPKAD Kota M: DAU			5 ExBAU
	6. Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya peralatan kebersihan kantor	Bulan	12	52.046.000	12	64.582.000	12	60.249.751	BPKAD Kota M: DAU			6 ExBAU
	7. Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	37.630.000	12	41.000.000	12	47.462.625	BPKAD Kota M: DAU			7 ExBAU
	8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	30.900.000	12	32.751.000	12	36.928.238	BPKAD Kota M: DAU			8 ExBAU
	9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya peralatan penerangan gedung	Bulan	12	24.959.000	12	26.285.000	12	31.718.925	BPKAD Kota M: DAU			9 ExBAU
	10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	Jenis	2	26.200.000	2	20.000.000	2	44.452.800	BPKAD Kota M: DAU			10 ExBAU



NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	SAGU INDIKA TIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORIT AS	STATUS
				TOLOK UKUR	SATUAN	TAR1	Tahun2017	TAR42	Tahun2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11. Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya logistik kantor	Tabung	24	3.600.000	24	12.672.000	24	4.167.450	BPKAD Kota M: DAU		11	ExBAU
	12. Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	Bulan	12	97.272.000	12	107.004.000	12	112.604.499	BPKAD Kota M: DAU		12	ExBAU
	13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi antar daerah	Bulan	12	200.589.000	12	225.475.000	12	250.427.859	BPKAD Kota M: DAU		13	ExBAU
	14. Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	tersedianya tenaga kontrak, petugas keamanan	Orang	23	446.586.000	23	446.665.200	23	540.369.060	BPKAD Kota M: DAU		14	ExBAU
	15. Pengelolaan administrasi kepegawaian	laporan administrasi kepegawaian	Dokumen	82	75.390.000	82	125.000.000	82	90.294.750	BPKAD Kota M: DAU		15	ExBAU
	16. Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda	Jumlah pembayaran PBB Tanah Pemda	%	100	47.700.000	100	0	100	49.700.000	BPKAD Kota M: DAU		16	ExBAU
	17. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional (pengelola barane)	Jumlah kendaraan dinas Pengelola Barang dengan kelengkapan surat kendaraan				0	10	0	0	BPKAD Kota M: DAU		17	ExBAU
5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				1.018.908.750		711.140.000		926.736.694				
	1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	Unit	1	72.650.000	1	80.415.000	1	84.101.456	BPKAD Kota M: DAU		1	ExBAU
	2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas terpelihara	Unit	64	456.500.000	64	372.340.000	64	528.455.813	BPKAD Kota M: DAU		2	ExBAU
	3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung yang terpelihara	Unit	33	22.025.000	33	37.510.000	33	25.496.691	BPKAD Kota M: DAU		3	ExBAU
	4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan yang dipelihara	Jenis	7	254.283.750	7	213.675.000	7	280.347.834	BPKAD Kota M: DAU		4	ExBAU
	5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah mebeleur yang diperbaiki	Buah	20	7.200.000	20	7.200.000	20	8.334.900	BPKAD Kota M: DAU		5	ExBAU
	6. Pengadaan peralatan gedung kantor	terpenuhinya kebutuhan laptop dan printer	Unit	4	46.250.000	4	0	0	0	BPKAD Kota M: DAU		6	ExBAU
	7. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	tersedianya fasilitas perkantoran yang memadai	M2	127,4	160.000.000	127,4	0	0	0	BPKAD Kota M: DAU		7	ExBAU
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				229.861.700		233.134.500		328.300.467				
	1. Penyusunan Renstra SKPD	Tercapainya perencanaan strategis 5 tahunan SKPD	Dokumen	1	24.600.000	1	0	0	0	BPKAD Kota M: DAU		1	rencana
	2. Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan realisasi keuangan kegiatan per semester	Laporan	3	12.868.900	2	15.054.500	3	15.571.369	BPKAD Kota M: DAU		2	ExBAU
	3. Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	Jumlah SPJ yang diverifikasi	Bulan	12	62.306.000	12	91.736.000	12	107.870.895	BPKAD Kota M: DAU		3	ExBAU

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	SAGU INDIKA TIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORIT AS	STATUS
				TOLOK UKUR	SATUAN	TAR1	Tahun2017	TAR42	Tahun2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	Laporan kinerja SKPD	Dokumen	1	15.984.100	1	12.851.000	1	19.340.761	BPKAD Kota M; DAU		4	ExBAU
	5. Penyusunan RKA-SKPD	RKA Penetapan, RKPA (RKA Perubahan)	Dokumen	2	51.267.700	2	43.390.000	2	62.033.917	BPKAD Kota M; DAU		5	ExBAU
	6. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	12	62.835.000	12	70.103.000	12	123.483.525	BPKAD Kota M; DAU		6	ExBAU
7	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					0	3.714.653.400		0				
	1. Peningkatan status tanah yang dimohon warga	Jumlah barang yang terkuasai per total jumlah BMD			0	100	41.581.000		0	BPKAD DAU		1	rencana
	2. Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	Pelaksanaan proses pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Magelang			0	12	321.319.000		0	BPKAD Kota M; DAU		2	rencana
	3. Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan dalam rangka memfasilitasi inventarisasi tanah milik Pemerintah Kota			0	1	88.162.000		0	BPKAD Kota M; DAU		3	rencana
	4. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah barang yang digunakan dan dimanfaatkan per total jumlah barang			0	3	59.402.000		0	DAU		4	rencana
	5. Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	Jumlah bidang tanah milik Pemkot yang diukur kembali untuk menegaskan batas-batasnya			0	2	13.320.000		0	BPKAD Kota M; DAU		5	rencana
	6. Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	Jenis laporan pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun			0	6	83.735.000		0	BPKAD Kota M; DAU		6	rencana
	7. Penaksiran barang milik daerah	Jumlah barang yang dinilai/ditaksir per jumlah barang yang perlu ditaksir			0	4	77.345.000		0	BPKAD Kota M; DAU		7	rencana
	8. Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			0	2	115.190.000		0	BPKAD Kota M; DAU		8	rencana
	9. Monitoring penggunaan/pemanfaatan tanah/dan atau bangunan	Jumlah kegiatan monitoring penggunaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan.			0	4	74.048.000		0	BPKAD Kota M; DAU		9	rencana
	10. Penyelamatan aset daerah	Jumlah kegiatan penyelamatan aset daerah			0	12	216.471.000		0	BPKAD Kota M; DAU		10	rencana
	11. Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	Terlaksananya pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah			0	4	106.593.000		0	DAU		11	rencana
	12. Penghapusan Asset	Jumlah barang yang dipindahtangankan, dimusnahkan, dan dihapus per total jumlah barang			0	1	40.978.000		0	BPKAD Kota M; DAU		12	rencana
	13. Penilaian BMD untuk pemindahtanganan	Tersedianya data nilai limit tanah/bangunan yang kan dipindahtangankan			0	3	50.240.000		0	BPKAD Kota M; DAU		13	rencana
	14. Pemusnahan BMD	Jumlah BMD yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau dipindahtangankan			0	1	20.237.000		0	BPKAD Kota M; DAU		14	rencana
	15. Penilaian BMD untuk Pemanfaatan	Termanfaatkannya aset secara optimal			0	1	99.960.000		0	BPKAD Kota M; DAU		15	rencana

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	SATUAN	LAGU	Tahun2017	TAR42	Tahun2018	TAR3	Tahun2019	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORIT AS	STATUS
				INDIKA TIF									
1	2	TOLOK UKUR	4	TAR1	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	16. Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Data obyek pemakaian tanah dan atau bangunan Pemkot Magelang			0	7	109.609.000			0	BPKAD Kota M; DAU	16	rencana
	17. Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah	Petugas Pengelola BMD yang memahami peraturan BMD per jumlah semua petugas pengelola BMD			0	16	548.324.000			0	BPKAD Kota M; DAU	17	rencana
	18. Peningkatan Manajemen Aset/barang daerah	OPD yang tertib pengelolaan BMD			0	12	156.311.000			0	DAU	18	Smart City
	19. Penjualan aset daerah	Jumlah barang yang akan dijual/jumlah barang yang akan dihapus			0	1	78.647.000			0	BPKAD Kota M; DAU	19	rencana
	20. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional (pengelola barang)	Jumlah kendaraan dinas Pengelola Barang dengan kelengkapan surat kendaraan			0	10	11.390.000			0	BPKAD Kota M; DAU	20	ExBAU
	21. Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	Jumlah pembayaran PBB Tanah Pemda			0	100	47.700.000			0	BPKAD Kota M; DAU	21	ExBAU
	22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (pengelola barang)	Terwujudnya gedung kantor Pengelola Barang yang layak dan nyaman			0	3	365.574.400			0	BPKAD Kota M; DAU	22	ExBAU
	23. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas (pengelola barang)	Terpeliharanya kendaraan dinas Pengelola Barang			0	10	322.272.000			0	BPKAD Kota M; DAU	23	ExBAU
	24. Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	Jumlah pembayaran PBB Gedung Kantor			0	100	31.100.000			0	BPKAD Kota M; DAU	24	ExBAU
	25. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess (pengelola barang)	Terwujudnya Rumah Dinas dan Mess yang layak dan nyaman			0	7	577.030.000			0	BPKAD Kota M; DAU	25	ExBAU
	26. Pemeliharaan rutin/berkala sarana olahraga (pengelola barang)	Terwujudnya sarana olahraga Pengelola Barang yang layak dan nyaman			0	2	58.115.000			0	BPKAD Kota M; DAU	26	ExBAU
8	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah				6.987.769.200		6.207.310.100		10.292.613.310				
		Persentase pertumbuhan PAD		0	18,44%		19,18%		12,83%				
		Prosentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP		0	0,81		0,84		0,87				
		Rasio pajak daerah terhadap PAD		0	13,48%		12,56%		12,33%				
		Rasio retribusi daerah terhadap PAD		0	4,20%		3,63%		3,33%				
		Rasio bagi hasil laba BUMD terhadap PAD		0	2,50%		2,52%		2,54%				
		Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi		0	1		1		1				
	1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya nota keuangan, raperda dan perda tentang APBD	Dokumen	4	418.089.000	4	426.627.000	4	495.000.000	BPKAD Kota M; DAU		1	rencana

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	SAGU INDIKA TIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORIT AS	STATUS
				TOLOK UKUR	SATUAN	TAR1	Tahun2017	TAR42	Tahun2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya nota keuangan, raperdadan perda tentang APBD	Dokumen	3	243.900.000	3	241.496.000	3	421.459.000	BPKAD Kota M; DAU			2 rencana
	3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya nota keuangan, raperda dan perda tentang Perubahan APBD	Dokumen	4	354.081.000	4	349.841.000	4	428.438.000	BPKAD Kota M; DAU			3 rencana
	4. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya perwal tentang penjabaranPerubahan APBD	Dokumen	4	350.293.000	4	343.857.000	4	423.850.000	BPKAD Kota M; DAU			4 rencana
	5. Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Dokumen rancangan KUA dan dokumen KUA	Dokumen	2	225.629.000	2	213.961.000	2	273.100.000	BPKAD Kota M; DAU			5 rencana
	6. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Dokumen rancangan PPAS dan dokumen PPAS	Dokumen	2	114.716.000	2	98.549.000	2	165.191.000	BPKAD Kota M; DAU			6 rencana
	7. Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	Dokumen rancangan KUA perubahan dan dokumen KUA perubahan	Dokumen	2	194.900.000	2	181.651.000	2	336.000.000	BPKAD Kota M; DAU			7 rencana
	8. Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Dokumen rancangan PPAS perubahan dan Dokumen PPAS perubahan	Dokumen	2	90.288.000	2	95.430.000	2	156.017.664	BPKAD Kota M; DAU			8 rencana
	9. Penelitian DPA SKPD	DPA SKPD yang diteliti	SKPD	48	57.249.600	29	41.688.000	48	82.439.424	BPKAD Kota M; DAU			9 rencana
	10. Pengesahan DPA SKPD	Persetujuan dan Pengesahan DPA SKPD	SKPD	48	55.782.000	29	49.364.000	48	80.326.080	BPKAD Kota M; DAU			10 rencana
	11. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)	Persetujuan dan Pengesahan DPA Perubahan SKPD	SKPD	48	68.280.000	29	54.429.000	48	98.323.200	BPKAD Kota M; DAU			11 rencana
	12. Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	Buku Analisis Standar Belanja	Dokumen	3	120.597.000	3	124.538.000	3	208.000.000	BPKAD Kota M; DAU			12 rencana
	13. Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	jenis laporan pengelolaan barang milik daerah yang disusun	Laporan	6	46.258.000	8		0	52.962.000	BPKAD Kota M; DAU			13 rencana
	14. Monitoring penggunaan/pemanfaatan tanah/ dan atau bangunan	jumlah kegiatan monitoring penggunaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan	Kegiatan	4	79.232.000	4		0	90.714.000	BPKAD Kota M; DAU			14 rencana
	15. Penyelamatan aset daerah	jumlah kegiatan penyelamatan aset daerah	Kegiatan	12	218.698.000	12		0	250.388.000	BPKAD Kota M; DAU			15 rencana
	16. Penaksiran barang milik daerah	Jumlah barang yang dinilai/ditaksir per jumlah barang yang perlu ditaksir	Kegiatan	4	41.836.000	4		0	47.899.000	BPKAD Kota M; DAU			16 rencana
	17. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pembinaan pengelolaan BMD	Kegiatan	4	83.608.000	4		0	141.297.520	BPKAD Kota M; DAU			17 rencana
	18. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Daftar rencana kebutuhan barang milik daerah	Dokumen	2	91.809.000	2		0	155.157.210	BPKAD Kota M; DAU			18 rencana
	19. Penghapusan Asset	Jumlah barang yang dipindahtangankan, dimusnahkan, dan dihapus per total jumlah barang				0	1	0	0	BPKAD Kota M; DAU			19 rencana
	20. Penilaian BMD untuk pemindahtanganan	Tersedianya data nilai limit tanah/bangunan yang kan dipindahtangankan				0	3	0	0	BPKAD Kota M; DAU			20 rencana

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	SAGU INDIKA TIF	RAGU						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORIT AS	STATUS
				TOLOK UKUR	SATUAN	TAR1	Tahun2017	TAR42	Tahun2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	Pemusnahan BMD	Jumlah BMD yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau dipindahtangankan			0	1	0		0	BPKAD Kota M; DAU		21	rencana
22.	Penilaian BMD untuk pemanfaatan	Termanfaatkannya aset secara optimal			0	1	0	100	109.956.000	BPKAD Kota M; DAU		22	rencana
23.	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	Laporan bulanan, triwulanan, semesteran, skpp, lap sertifikasi, lap rekonsiliasi PD	Dokumen	370	156.205.000	500	175.829.000	370	221.500.000	BPKAD Kota M; DAU		23	rencana
24.	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) seluruh PD	%	100	180.601.000	3000	189.300.000	100	247.000.000	BPKAD Kota M; DAU		24	rencana
25.	Pengesahan dan penerbitan SPD	Dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) seluruh PD	%	100	82.303.000	170	86.500.000	100	109.000.000	BPKAD Kota M; DAU		25	rencana
26.	Penyusunan anggaran kas	Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tentang Penetapan Anggaran Kas seluruh PD	%	100	18.553.000	170	16.000.000	100	24.600.000	BPKAD Kota M; DAU		26	rencana
27.	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	Jumlah penatausahaan bantuan dan tak terduga sesuai dengan jumlah permohonan bantuan	%	100	209.910.000	2500	187.101.000	100	235.000.000	BPKAD Kota M; DAU		27	rencana
28.	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D SKPD	SP2D yang diterbitkan	Dokumen	1350	89.000.000	1350	75.706.000	1350	110.000.000	BPKAD Kota M; DAU		28	rencana
29.	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	Permohonan pencairan hibah dan bantuan sosial	%	100	127.111.000	100	127.063.000	100	147.000.000	BPKAD Kota M; DAU		29	rencana
30.	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	Terinformasinya posisi pengajuan SPM untuk penerbitan SP2D Belanja Langsung bagi seluruh PD	%	100	26.925.000	3000	26.925.000	100	35.700.000	BPKAD Kota M; DAU		30	rencana
31.	Pembuatan Daftar Gaji	SP2D yang diterbitkan	Dokumen	1400	153.078.000	1400	131.474.000		0	BPKAD Kota M; DAU		31	rencana
32.	Penataan dokumen pencairan dana belanja langsung elektronik	Dokumen Pencairan Dana Belanja Langsung dalam bentuk elektronik.	%	100	0	3000	75.600.100	100	87.000.000	BPKAD Kota M; DAU		32	rencana
33.	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel	Buku	612	190.860.000	12	209.121.000	612	226.510.000	BPKAD Kota M; DAU		33	rencana
34.	Penelitian dan asistensi laporan keuangan SKPD	Tersusunnya laporan keuangan PD yang akuntabel	Laporan	552	77.700.000	348	125.592.000	552	90.100.000	BPKAD Kota M; DAU		34	rencana
35.	Penyusunan laporan pajak	Tersedianya laporan pajak setiap bulan	Buku	84	95.860.000	12	90.571.000	84	127.896.000	BPKAD Kota M; DAU		35	rencana
36.	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	Laporan bulanan PPKD	%	100	58.023.000	12	64.412.000	100	67.170.000	BPKAD Kota M; DAU		36	rencana
37.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bendahara dan PPK yang dibina	Orang	100	246.860.000	100	254.334.000	100	328.570.000	BPKAD Kota M; DAU		37	rencana
38.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel	Buku	88	61.047.000	1	55.880.000	88	73.867.000	BPKAD Kota M; DAU		38	rencana
39.	Penyusunan data keuangan daerah	Data keuangan daerah yang akuntabel			0	12	101.230.000	100	123.000.000	BPKAD Kota M; DAU		39	rencana

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	SAGU INDIKA TOR							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORIT AS	STATUS
				TOLOK UKUR	SATUAN	TAR1	Tahun2017	TAR42	Tahun2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	40. Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	Jumlah pengelola keuangan sekolah yang dibina			0	74	228.809.000		0	BPKAD Kota M: DAU		40	rencana
	41. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel	Buku	520	212.809.000	520	200.078.000	520	284.350.000	BPKAD Kota M: DAU		41	rencana
	42. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel	Buku	120	212.833.000	120	196.711.000	120	283.279.000	BPKAD Kota M: DAU		42	rencana
	43. Penataan Dokumen Anggaran Elektronik	Arsip dokumen anggaran dalam bentuk elektronik	Bulan	12	38.293.000	29	40.557.000	12	66.170.304	BPKAD Kota M: DAU		43	rencana
	44. Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah	Petugas Pengelola BMD yang memahami Peraturan BMD per jumlah semua petugas pengelola BMD	Kegiatan	3	379.208.000	16	0	3	434.156.000	BPKAD Kota M: DAU		44	rencana
	45. Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Data obyek pemakaian tanah dan atau bangunan Pemkot Magelang	Kecamatan	3	44.194.000	7	0	3	74.687.860	BPKAD Kota M: DAU		45	rencana
	46. Penyusunan Sistem dan Prosedur Penganggaran Daerah	Tersusunnya perwal tentang sistem penganggaran daerah	Perwal	1	46.140.000	2	44.078.000	1	55.800.000	BPKAD Kota M: DAU		46	rencana
	47. Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	Penyusunan anggaran di OPD dan Kelurahan			0	83	12.889.000		0	BPKAD Kota M: DAU		47	Smart City
	48. Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	SKPD yang tertib pengelolaan BMD	Bulan	12	167.253.000	12	0	12	191.489.000	BPKAD Kota M: DAU		48	Smart City
	49. Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel	Laporan	3	267.590.000	3	288.464.000	3	356.163.500	BPKAD Kota M: DAU		49	Smart City
	50. Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	Terverifikasinya anggaran kas penetapan, perubahan, mendahului perubahan dan pergeseran APBD	%	100	45.320.000	29	69.670.000	100	78.312.960	BPKAD Kota M: DAU		50	rencana
	51. Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	Laporan Informasi anggaran daerah dan perubahan	Laporan	2	21.408.000	2	25.108.000	2	36.993.024	BPKAD Kota M: DAU		51	rencana
	52. Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)	DPA perubahan SKPD yang diteliti	SKPD	48	59.289.600	29	44.999.000	48	85.377.024	BPKAD Kota M: DAU		52	rencana
	53. Penjualan aset daerah	Jumlah barang yang dijual/jumlah barang yang akan dihapus	Kegiatan	1	76.861.000	1	0	1	87.999.000	BPKAD Kota M: DAU		53	rencana
	54. Penyusunan laporan posisi kas daerah	Laporan kas dan perkiraan belanja bulanan/indikasi kebutuhan daerah kepada Kementerian Keuangan RI	%	100	0	12	60.000.000	100	77.000.000	BPKAD Kota M: DAU		54	rencana
	55. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya perwal tentang sisdur pengelolaan keuangan daerah	Perwal	1	56.356.000	1	40.500.000	1	75.900.000	BPKAD Kota M: DAU		55	rencana
	56. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Perwal tentang pengelolaan barang milik daerah	Perwal	1	54.595.000		0		0	BPKAD Kota M: DAU		56	rencana
	57. Penyusunan laporan tugas pembantuan	Laporan Keuangan gabungan tugas pembantuan sebagai bahan laporan keuangan daerah	Buku	20	45.116.000	20	0	20	51.433.000	BPKAD Kota M: DAU		57	rencana
	58. Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Pameran hasil pembangunan daerah	Kegiatan	1	36.405.000	1	37.505.000		0	BPKAD Kota M: DAU		58	rencana

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	SAGU INDIKA TIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORIT AS	STATUS
				TOLOK UKUR	SATUAN	TAR1	Tahun2017	TAR42	Tahun2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	59. Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	Terkoordinasinya dan terdatanya tertib administrasi laporan	%	100	115.278.000	100	116.220.000	100	141.050.000	BPKAD Kota M: DAU		59	rencana
	60. Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah	Sistem informasi pengelolaan keuangan sekolah				0	100	0	0	BPKAD Kota M: DAU		60	rencana
	61. Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	Rapat Koordinasi dan laporan	Laporan	12	452.253.000	12	452.253.000		0	BPKAD Kota M: DAU		61	rencana
	62. Pengendalian dan penerbitan SPM	SPM yang diterbitkan	%	100	27.286.000	1800	35.245.000		0	BPKAD Kota M: DAU		62	rencana
	63. Workshop pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya aparaturnya yang memahami pengelolaan keuangan daerah				0	100	100.155.000	1	109.661.200	BPKAD Kota M: DAU	63	rencana
	64. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (pengelola barang)	Terwujudnya gedung kantor Pengelola Barang yang layak dan nyaman				0	3	0	100	402.131.840	BPKAD Kota M: DAU	64	ExBAU
	65. Pemeliharaan rutin/berkala rumdin/mess (pengelola barang)	Terwujudnya Rumah Dinas dan Mess yang layak dan nyaman				0	7	0	100	577.030.000	BPKAD Kota M: DAU	65	ExBAU
	66. Pemeliharaan rutin/berkala sarana olahraga (pengelola barang)	Terwujudnya sarana olahraga Pengelola Barang yang layak dan nyaman				0	2	0	100	228.926.500	BPKAD Kota M: DAU	66	ExBAU
	67. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas (pengelola barang)	Terpeliharanya kendaraan dinas Pengelola Barang				0	10	0	100	324.272.000	BPKAD Kota M: DAU	67	ExBAU
9	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah				3.314.174.600		2.665.378.000		3.169.339.352				
	1. Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggal Pajak Daerah	Jumlah dana dan data tunggakan pajak daerah	Data	120	124.453.000	120	160.783.000	120	156.443.078	BPKAD Kota M: DAU		1	Tema RKPD 2018
	2. Intensifikasi Pemungutan PBB	tercapainya target penerimaan PBB P-2, pelaksanaan PBB P-2, panutan, dan pemberian penghargaan kepada kelurahan. RW. RT dan	Kegiatan	4	297.798.000	4	281.448.000	4	396.369.138	BPKAD Kota M: DAU		2	Tema RKPD 2018
	3. Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	Terbitnya SPPT, SSPD, DHKP dan DHR PBB	Bulan	12	892.569.000	12	389.019.000	12	515.854.339	BPKAD Kota M: DAU		3	Tema RKPD 2018
	4. Verifikasi Dan Validasi Data Piutang PBB	Data piutang PBB-P2 yang valid	Bulan	6	406.413.000	6	145.613.000	6	375.891.703	BPKAD Kota M: DAU		4	Tema RKPD 2018
	5. Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	adanya kenaikan estimasi potensi PBB-P2	Lokasi	100	267.046.000	100	281.946.000	100	355.438.226	BPKAD Kota M: DAU		5	Tema RKPD 2018
	6. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	jumlah peserta yang tersosialisasi			47.132.000		55.052.000		0	BPKAD Kota M: DAU		6	Tema RKPD 2018
	7. Penyusunan Sistem Prosedur Pendapatan Daerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah				0	1	61.834.000		0	BPKAD Kota M: DAU	7	Tema RKPD 2018
	8. Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dana dan laporan Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	Laporan	12	115.525.000	12	114.730.000	12	133.734.628	BPKAD Kota M: DAU		8	Smart City
	9. Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	Jumlah dana dan jumlah WP yang diaudit	Laporan	20	48.157.000	20	51.357.000	20	64.096.967	BPKAD Kota M: DAU		9	Tema RKPD 2018

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	SAGU INDIKA TIF	TAR1	Tahun2017	TAR42	Tahun2018	TAR3	Tahun2019	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORIT AS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	Intensifikasi Pendapatan dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah	intensifikasi pemanfaatan barang milik daerah	Bulan	12	6.592.000	12	0	12	0	BPKAD Kota M; DAU	DAU	10	rencana
11.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah raperda tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah	%	100	50.000.000		0		0	BPKAD Kota M; DAU	DAU	11	rencana
12.	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	laporan bulanan dan triwulanan realisasi pencairan dana perimbangan dan lain-lain pendapatanm	Laporan	16	121.504.000	16	140.049.000		0	BPKAD Kota M; DAU	DAU	12	rencana
13.	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	jumlah dana dan pajak daerah	Dokumen	50	69.867.600	50	119.916.000	50	84.539.796		DAU	13	rencana
14.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah dana dan Laporan Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Laporan	4	288.350.000	4	239.782.000	4	333.801.169		DAU	14	Tema RKPD 2018
15.	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	Jumlah dana dan Laporan Potensi Subyek dan Obyek Pajak	Laporan	2	33.295.000	2	38.463.000	2	44.315.645	BPKAD Kota M; DAU	DAU	15	Tema RKPD 2018
16.	Evaluasi Bulanan Dan Triwulanan PAD Dan PBB	Jumlah Dana dan Rapat Koordinasi serta Evaluasi PAD dan PBB	Laporan	12	50.094.000	12	51.731.000	12	66.675.114	BPKAD Kota M; DAU	DAU	16	Tema RKPD 2018
17.	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah dana dan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah	Laporan	12	150.800.000	12	126.500.000	12	200.714.800	BPKAD Kota M; DAU	DAU	17	Tema RKPD 2018
18.	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB Dan Pajak Air Tanah	Jumlah dana dan Laporan Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB dan PAT	Laporan	12	51.700.000	12	125.896.000	12	68.812.700	BPKAD Kota M; DAU	DAU	18	Tema RKPD 2018
19.	Penatausahaan Dokumen Reklame Dan Penempatan	Jumlah dana dan laporan penatausahaan dokumen reklame dan penempatan	Laporan	12	65.649.000	12	73.899.000	12	70.208.919	BPKAD Kota M; DAU	DAU	19	Tema RKPD 2018
20.	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	tertib administrasi PBB-P2	Laporan	28	227.230.000	28	207.360.000	28	302.443.130	BPKAD Kota M; DAU	DAU	20	Tema RKPD 2018
Urusan Pilihan Kepegawaian													
TOTAL					14.265.959.950		15.798.447.200		17.869.334.080				
							15.798.447.200		-				



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2018 pada dasarnya merupakan perencanaan kegiatan selama 1 tahun kedepan serta evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, dimana dalam penyusunannya mengacu pada Renstra Perubahan BPKAD Kota Magelang Tahun 2016 – 2021.

Disamping mengacu pada RPJMD, juga sudah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan serta Visi, Misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra DPPKD serta bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Magelang yang tertuang dalam RPJMD Kota Magelang. Disamping hal tersebut, Renja juga sebagai dasar dalam penyusunan anggaran pada masing-masing kegiatan di lingkup BPKAD Kota Magelang.

Dengan adanya Rencana Kerja BPKAD Kota Magelang Tahun 2018 diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018 dapat mensinergikan dengan program dan kegiatan SKPD yang lain disamping Renja BPKAD Kota Magelang juga merupakan pengendali kegiatan pada masing-masing Subbag/Subbid dan Bidang di lingkup BPKAD Kota Magelang.

**KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN dan ASET DAERAH  
KOTA MAGELANG**



**LARSITA, SE, MSc**  
**Pembina Tingkat I / IV. b**  
**NIP. 19661202 199003 1 008**

**TABEL 5.2**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG**  
**TAHUN 2016-2021**

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
					2016		2017		2018		2019		2020		2021	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	Mewujudkan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	Tercapainya peningkatan pendapatan daerah	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah													
				Derajat ekonomi fiskal												
				Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat												
				Rasio pajak daerah terhadap PAD												
				Ratio retribusi daerah terhadap PAD												
				Prosentase pertumbuhan PAD												
			Kegiatan :													
			Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	Terkoordinasinya dan Terdatanya Tertib Administrasi Laporan	12 laporan	121.848.000	100%	127.950.000	100%	134.350.000	100%	141.050.000	100%	148.100.000	100%	155.500.000
			Penyusunan Raperda Tentang Pembentukan Dana Cadangan	Peraturan daerah												
			Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah dana dan Laporan Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi	4 lap	288.350.000	4 lap	302.767.500	4 lap	317.905.875	4 lap	333.801.169	4 lap	350.491.227	4 lap	350.491.227
			Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	Jumlah dana dan Laporan Potensi subjek dan Objek pajak	2 lap	33.295.000	2 lap	36.624.500	2 lap	40.286.950	2 lap	44.315.645	2 lap	48.747.210	2 lap	48.747.210
			Evaluasi Bulanan Dan Triwulanan PAD Dan PBB	Jumlah dana dan Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD dan PBB	12 lap	50.094.000	12 lap	55.103.400	12 lap	60.613.740	12 lap	66.675.114	12 lap	73.342.625	12 lap	73.342.625
			Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah dana dan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	12 lap	150.800.000	12 lap	165.880.000	12 lap	182.468.000	12 lap	200.714.800	12 lap	220.786.280	12 lap	220.786.280
			Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah	Jumlah dana dan Data Tunggakan Pajak daerah	120 WP	117.538.000	120 WP	129.291.800	120 WP	142.220.980	120 WP	156.443.078	120 WP	172.087.386	120 WP	172.087.386
			Intensifikasi Pemungutan PBB	tercapainya target penerimaan PBB-P2, pelaksanaan PBB-P2 Panutan, dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT, Wajib pajak	4 kegiatan	297.798.000	4 kegiatan	327.577.800	4 kegiatan	360.335.580	4 kegiatan	396.369.138	4 kegiatan	436.006.052	4 kegiatan	479.606.657
			Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	Tertib Administrasi PBB-P2	28 Laporan	227.230.000	28 Laporan	249.953.000	28 Laporan	274.948.300	28 Laporan	302.443.130	28 Laporan	332.687.443	28 Laporan	365.956.187
			Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB Dan Pajak Air Tanah	Jumlah dana dan Laporan Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB dan PAT	12 lap	51.700.000	12 lap	56.870.000	12 lap	62.557.000	12 lap	68.812.700	12 lap	75.693.970	12 lap	75.693.970
			Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	Terbitnya SPPT, SSPD, DHKP dan DHR PBB	12 bulan	892.569.000	12 bulan	426.325.900	12 bulan	468.958.490	12 bulan	515.854.339	12 bulan	567.439.773	12 bulan	624.183.750
			Penatausahaan Dokumen Reklame Dan Penempatan	Jumlah dana dan Laporan Penatausahaan Dokumen Reklame dan Penempatan	12 lap	52.749.000	12 lap	58.023.900	12 lap	63.826.290	12 lap	70.208.919	12 lap	77.229.811	12 lap	77.229.811
			Verifikasi Dan Validasi Data Piutang PBB	Data Piutang PBB-P2 yang valid	6 bulan	406.413.000	6 bulan	310.654.300	6 bulan	341.719.730	6 bulan	375.891.703	6 bulan	413.480.873	6 bulan	454.828.961
			Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dana dan Laporan Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli daerah	12 lap	115.525.000	12 lap	121.301.250	12 lap	127.366.313	12 lap	133.734.628	12 lap	140.421.360	12 lap	140.421.360
			Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	Jumlah dana dan Jumlah WP Yang di Audit	20 lap	48.157.000	20 lap	52.972.700	20 lap	58.269.970	20 lap	64.096.967	20 lap	70.506.664	20 lap	70.506.664



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
				Verifikasi anggaran kas mendahului perubahan	15 SKPD		15 SKPD		15 SKPD		15 SKPD		15 SKPD		15 SKPD		
				Terverifikasi anggaran kas pengeseran APBD	25 SKPD		25 SKPD		25 SKPD		25 SKPD		25 SKPD		25 SKPD		
			Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	Laporan Informasi Anggaran Daerah dan Perubahan	2 Laporan	21.408.000	2 Laporan	25.689.600	2 Laporan	30.827.520	2 Laporan	36.993.024	2 Laporan	44.391.629	2 Laporan	53.269.955	
			Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD	DPA perubahan SKPD yang diteliti	48 SKPD	49.408.000	48 SKPD	59.289.600	48 SKPD	71.147.520	48 SKPD	85.377.024	48 SKPD	102.452.429	48 SKPD	122.942.915	
			Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD	Persetujuan dan Pengesahan DPA perubahan SKPD	48 SKPD	56.900.000	48 SKPD	68.280.000	48 SKPD	81.936.000	48 SKPD	98.323.200	48 SKPD	117.987.840	48 SKPD	141.585.408	
			Penataan Dokumen Anggaran Elektronik	Arsip dokumen Anggaran dalam bentuk elektronik	12 bulan	38.293.000	12 bulan	45.951.600	12 bulan	55.141.920	12 bulan	66.170.304	12 bulan	79.404.365	12 bulan	95.285.238	
3	Mewujudkan Penatausahaan Keuangan yang Efektif dan Transparan	Terciptanya tertib administrasi pencairan dana	<b>Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>														
				Prosentase pencairan dana belanja langsung dan tidak langsung													
				Kegiatan :													
				Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	laporan bulanan, triwulanan, semesteran, skpp, lap sertifikasi, lap rekonsiliasi skpd	360 berkas	174.205.000	370 berkas	189.500.000	370 berkas	205.500.000	370 berkas	221.500.000	370 berkas	238.500.000	370 berkas	255.000.000
				Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) seluruh SKPD	100%	185.951.000	100%	204.500.000	100%	224.900.000	100%	247.000.000	100%	271.000.000	100%	298.000.000
				Pengesahan dan penerbitan SPD	Dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) seluruh SKPD	100%	82.303.000	100%	90.500.000	100%	99.500.000	100%	109.000.000	100%	119.900.000	100%	131.800.000
				Pengendalian dan penerbitan SPM													
				Penyusunan anggaran kas	Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tentang Penetapan Anggaran Kas seluruh SKPD	100%	18.553.000	100%	20.400.000	100%	22.400.000	100%	24.600.000	100%	27.000.000	100%	29.700.000
				Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga		100%	213.900.000	100%	213.900.000	100%	235.000.000	100%	235.000.000	100%	258.500.000	100%	284.000.000
				Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D PD	SP2D yang diterbitkan	1350 sp2d	75.750.000	1350 sp2d	89.000.000	1350 sp2d	99.500.000	1350 sp2d	110.000.000	1350 sp2d	121.000.000	1350 sp2d	132.000.000
				Pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah		100%	133.800.000	100%	133.800.000	100%	147.000.000	100%	147.000.000	100%	161.700.000	100%	177.800.000
				Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	Terinformasinya posisi pengajuan SPM untuk penerbitan SP2D Belanja Langsung bagi seluruh SKPD	100%	26.925.000	100%	29.600.000	100%	32.500.000	100%	35.700.000	100%	39.200.000	100%	43.100.000
				Pembuatan Daftar Gaji													
				<b>Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>													
				Terwujudnya penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah sisdu pengelolaan keuangan yang sesuai dengan perkembangan ketentuan												
				Kegiatan :													
				Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Perwal tentang Sisdu Pengelolaan Keuangan daerah	1 Perwal	57.356.000	1 Perwal	63.000.000	1 Perwal	69.000.000	1 Perwal	75.900.000	1 Perwal	83.400.000	1 Perwal	91.700.000
				Penyusunan Sistem dan Prosedur Penganggaran Daerah	Perwal tentang Sisdu Penganggaran daerah			1 perwal	46.140.000	1 Perwal	50.750.000	1 Perwal	55.800.000	1 Perwal	61.400.000	1 Perwal	67.550.000



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
					2016		2017		2018		2019		2020		2021	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
			Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah	Jumlah petugas Pengelola BMD yang memahami Peraturan BMD per jumlah semua petugas Pengelola BMD	3 kegiatan	354.400.000	3 kegiatan	379.208.000	3 kegiatan	405.753.000	3 kegiatan	434.156.000	3 kegiatan	464.547.000	3 kegiatan	497.066.000
			Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	Jenis laproan pengelolaan barang milik daerah yang disusun	6 laporan	43.231.000	600%	46.258.000	600%	49.497.000	600%	52.962.000	600%	56.670.000	600%	60.637.000
			Penjualan aset daerah	Jumlah barang yang dijual / jumlah barang yang akan dihapus / jumlah barang	1 kegiatan	71.832.000	100%	76.861.000	100%	82.242.000	100%	87.999.000	100%	94.159.000	100%	100.751.000
			Monitoring penggunaan/pemanfaatan tanah/ dan atau bangunan	Jumlah kegiatan monitoring penggunaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan	4 kegiatan	74.048.000	400%	79.232.000	400%	84.779.000	400%	90.714.000	400%	97.064.000	400%	103.859.000
			Penyelamatan aset daerah	Jumlah kegiatan penyelamatan aset daerah	12 kegiatan	204.390.000	1200%	218.698.000	1200%	234.007.000	1200%	250.388.000	1200%	267.916.000	1200%	286.671.000
			Penaksiran barang milik daerah	Jumlah barang yang dinilai/ditaksir per jumlah barang yang perlu ditaksir	4 kegiatan	39.099.000	400%	41.836.000	400%	44.765.000	400%	47.899.000	400%	51.252.000	400%	54.840.000
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah													
			Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah													
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah													
			Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah													
			<b>Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan</b>													
			Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah barang yang digunakan dan dimanfaatkan per total jumlah barang	300%	77.402.000	300%	82.821.000	300%	88.619.000	300%	94.823.000	300%	101.461.000	300%	108.564.000
			Peningkatan status tanah yang dimohon warga	Jumlah barang yang terkuasai per total jumlah BMD	100%	37.924.000	100%	40.579.000	100%	43.420.000	100%	46.460.000	100%	49.713.000	100%	53.193.000
			Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	pelaksanaan proses pensertifikatan aset tanah pemerintah Kota Magelang	12 bidang	336.727.000	12 bidang	360.298.000	12 bidang	385.519.000	12 bidang	412.506.000	12 bidang	441.382.000	12 bidang	472.279.000
			Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan dalam rangka memfasilitasi inventarisasi tanah milik pemerintah kota	1 kegiatan	88.162.000	100%	94.334.000	100%	100.938.000	100%	108.004.000	100%	115.565.000	100%	123.655.000
			Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Milik Pemda	Jumlah bidang tanah milik Pemkotayang diukur kembali untuk menegaskan batas-batasnya	2 bidang	12.250.000	200%	13.108.000	200%	14.026.000	200%	15.008.000	200%	16.059.000	200%	17.184.000